

ANALISIS AKSESIBILITAS NELAYAN TERHADAP PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH

ANALYSIS OF ACCESSIBILITY FISHERMAN TO FINANCING IN ISLAMIC BANKING

Tri Purnama Sari^{1a}, Tuti Kurnia², Anas Alhifni³

¹Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.

²Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

³ Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

^aKorespondensi E-mail: tripurnamasari541@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how fishing access in obtaining financing in Islamic banking and the role of the bank to assist fishermen in economic difficulties. Qualitative descriptive method was used in this study with the primary and secondary data sources. The results of this study indicate that the fishing economy in general is still relatively low and the access of fishermen to obtain financing in Islamic banks is still difficult because the fishermen are not able to provide guarantees to the bank as a form of one of the terms of filing cost, and there are some other requirements can not be fulfilled and incomprehensible by fishermen. So that enables obtaining financing Islamic banks have large fishing or fishing only certain skipper, because they are able to meet the requirement set by the bank as having something that can serve as collateral. Of the many products on the financing of Islamic banks, there is one product that can be used fishermen to obtain appropriate financing to meet the needs of fishermen in the problem of shortage of funds. The loan product is the Micro KUR products iB where the provisions of economic sectors which can be financed by a bank of them is the fisheries sector. This product can be an alternative for fishermen from several existing micro products that can help meet the needs of fishermen. there is one product that can be used fishermen to obtain appropriate financing to meet the needs of fishermen in the problem of shortage of funds. The loan product is the Micro KUR products iB where the provisions of economic sectors which can be financed by a bank of them is the fisheries sector. This product can be an alternative for fishermen from several existing micro products that can help meet the needs of fishermen. there is one product that can be used fishermen to obtain appropriate financing to meet the needs of fishermen in the problem of shortage of funds. The loan product is the Micro KUR products iB where the provisions of economic sectors which can be financed by a bank of them is the fisheries sector. This product can be an alternative for fishermen from several existing micro products that can help meet the needs of fishermen.

Keywords: Accessibility, Financing, , Fisherman

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akses nelayan dalam memperoleh pembiayaan di perbankan syariah dan peran serta bank untuk membantu kesulitan nelayan dalam perekonomiannya. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian nelayan umumnya masih tergolong rendah dan akses nelayan untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah masih sulit karena nelayan

tidak mampu memberikan jaminan kepada bank sebagai bentuk salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan, serta ada beberapa persyaratan lainnya yang tidak mampu dipenuhi dan tidak dimengerti oleh nelayan. Sehingga yang memungkinkan memperoleh pembiayaan bank syariah ini hanya nelayan besar atau nelayan juragan tertentu, dikarenakan mereka mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank seperti memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Dari sekian banyak produk-produk pembiayaan di bank syariah, ada satu produk yang dapat digunakan nelayan untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam masalah kekurangan dana. Produk pembiayaan tersebut adalah produk KUR Mikro iB dimana dalam ketentuannya sektor ekonomi yang dapat dibiayai oleh bank satu diantaranya adalah sektor perikanan. Produk ini mampu menjadi satu alternatif bagi nelayan dari beberapa produk mikro yang ada yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nelayan.

Kata kunci: Aksesibilitas, Nelayan, Pembiayaan.

Sari, T. P., Kurnia, T., & Alhifni, A. 2022. Analisis Aksesibilitas Nelayan Terhadap Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Nisbah* 8 (1): 40-49.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dan menjadi peluang untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidupnya mengandalkan pada penghasilan dari tangkapan laut. Penduduk yang bermukim di wilayah pantai sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan sering kali disebut sebagai masyarakat berlatarbelakang kehidupan ekonomi yang rendah. Para nelayan kecil sering dihadapkan dengan berbagai masalah, tetapi mereka tetap bertahan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Mulai dari harga jual hasil tangkapan ikan yang rendah, lemahnya posisi penawaran dengan para pemilik modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya penguasaan dan teknologi serta maraknya praktik ilegal tangkap ikan (Illegal Fishing). Dibalik permasalahan masyarakat nelayan kecil yang banyak, terdapat hal yang sangat mendasar yaitu ketergantungan nelayan terhadap sistem sosial yang menjerat para nelayan kecil pada kemiskinan (Purna, 2005:03; Tampubolon, 2009:06; Wijayanti, Ihsannudin, 2013:150; Simahelut, 2010:1).

Pendapatan nelayan memiliki siklus yang berbeda tergantung dari masanya yaitu masa paceklik dan panen

raya. (Kurnia et al, 2021). Penyebab dari masalah kemiskinan yang seringkali dihadapi oleh nelayan kecil adalah sulitnya mendapatkan bantuan modal usaha dengan menggunakan sistem pembiayaan di lembaga keuangan, terutama pada lembaga keuangan bank. Kesulitan tersebut muncul disebabkan nelayan tidak memiliki jaminan sebagai persyaratan dari pembiayaan tersebut. Akses nelayan terhadap pembiayaan formal seperti pada lembaga keuangan bank ataupun nonbank sangat terbatas, tetapi nelayan dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari sumber informal seperti bank keliling atau rentenir dengan pembayaran bunga tinggi. Nelayan memilih mengambil pinjaman dari rentenir karena proses pencairan yang cepat dan tanpa adanya jaminan atau agunan. Tanpa disadari nelayan justru merugi dengan menggunakan pinjaman dari rentenir tersebut, karena bunga hutang yang diberikan sangat tinggi justru akan menjerat nelayan itu sendiri (Tampubolon, 2009:05; Lubis, dkk, 2012:01; Sukron, 2013:03; Supanggih, widodo, 2013:181).

Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi nelayan mengenai kesulitan mereka dalam memperoleh modal, seharusnya lembaga keuangan bank dapat

menjadi solusi untuk permasalahan kebutuhan modal usaha nelayan, namun tingginya risiko profesi nelayan dengan pendapatan tidak menentu membuat beberapa lembaga keuangan bank kurang berminat memberikan pembiayaan berupa modal kegiatan usaha nelayan (Tampubolon, 2009:06; Asaad, 2011:114; Simahelut, 2010:3; Rahayu, 2015:55).

MATERI DAN METODE

Nelayan dan Kemiskinan

Menurut peraturan presiden RI No. 7 tahun 2005 perihal RJPMN 2004-2009 Nelayan kecil atau nelayan tradisional identik dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan ketika individu atau sekumpulan orang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dan sulit untuk mensejahterakan kehidupannya dan keluarganya. Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil menangkap ikan. Semakin banyak hasil tangkapan maka semakin tinggi pendapatan yang diterima, penghasilan tersebut sebagian besar dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari nelayan dan keluarganya dan sebagian lagi digunakan untuk modal melaut. Dengan begitu tingkat kecukupan kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan berdasarkan pendapatan yang diterimanya. Sumber daya perikanan di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan oleh nelayan di Indonesia untuk mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun faktanya masih sangat banyak nelayan yang belum bisa meningkatkan hasil tangkapannya dikarenakan faktor kemiskinan yang dialami nelayan, sehingga pendapatan sehari-hari nelayan tidak meningkat (Purna, 2005:03; Fathoni, 2015:1-2).

Pembiayaan di Perbankan Syariah

Kegiatan pembiayaan (*financing*) adalah satu dari beberapa tugas pokok

bank syariah, yaitu membantu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan biaya atau modal yang dialami masyarakat. Karena itu pemerintah melahirkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan selanjutnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang perbankan. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya meliputi bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan meliputi dua bagian, pertama pembiayaan produktif, ialah pembiayaan yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan produksi dalam pemahaman yang luas, kedua pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif meliputi dua hal, pertama pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, merupakan jumlah hasil produksi, mau pun secara kualitatif, ialah peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk kepentingan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang, (Falah, 2014:68).

Aksesibilitas Pembiayaan di Perbankan Syariah

Dua fungsi pokok bank syariah ialah mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dioperasikan bank syariah yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan penyaluran pembiayaan, baik berupa modal untuk usaha ataupun untuk konsumsi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan

pemberian pembiayaan. Analisis kelayakan pemberian pembiayaan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu :

1. Pendekatan analisis pembiayaan. Antara lain:
 - a. Pendekatan Jaminan, artinya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah bank selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh nasabah.
 - b. Pendekatan karakter, artinya bank akan mencermati dengan sungguh-sungguh karakter yang dimiliki nasabah untuk menghindari resiko adanya pembayaran macet.
 - c. Pendekatan kemampuan pelunasan, bank menganalisis kesanggupan nasabah untuk menyelesaikan jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah ke bank dengan menganalisis penghasilan nasabah setiap bulannya.
 - d. Pendekatan melalui studi kelayakan, bank memantau kelayakan usaha yang dioperasikan oleh nasabah.
 - e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, berarti bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary (perantara) keuangan, yaitu menata mekanisme dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan.
2. Penerapan prinsip analisis pembiayaan mengacu pada rumus 5C, diantaranya :
 - a. *Character*, ialah keadaan sifat atau karakter dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi atau dalam kegiatan usaha. Tujuan adanya analisis terhadap karakter pada nasabah ini yaitu untuk mencari tahu seberapa jauh kemampuan nasabah dalam menunaikan kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai perjanjian yang sudah ditentukan.
 - b. *Capital*, ialah besarnya dana yang dimiliki oleh nasabah sendiri. Semakin besar calon nasabah memiliki modal dalam perusahaannya, semakin tinggi keseriusan calon nasabah mengelola usahanya serta bank akan merasa betul-betul percaya memberikan pembiayaan.
 - c. *Collateral*, jaminan milik calon nasabah yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap agunan yang diberikan calon nasabah ke bank ini meliputi jenis bukti kepemilikan, lokasi dan status hukumnya. Bentuk collateral bentuknya tidak hanya kebendaan, tetapi bisa juga tidak berwujud, semacam jaminan pribadi (*borghtocht*), *letter of comport*, *Letter of guarantee*, rekomendasi dan avails.
 - d. *Condition*, ialah kondisi dan situasi yang berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah.
3. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting analisis pembiayaan adalah :
 - a. Berkas dan pencatatan
 - b. Analisis pendahuluan dan data inti
 - c. Penelitian data
 - d. Penelitian atas realisasi usaha
 - e. Penelitian mengenai rencana usaha
 - f. Penilaian barang agunan dan penelitiannya
 - g. Laporan keuangan dan juga penelitiannya
4. Keputusan pembiayaan
 Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak bank yang bertugas memutuskan pembiayaan dapat memberikan keputusan apakah permohonan pembiayaan tersebut memadai untuk dikabulkan atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan, maka pihak bank akan mengeluarkan surat keputusan pembiayaan yang biasanya

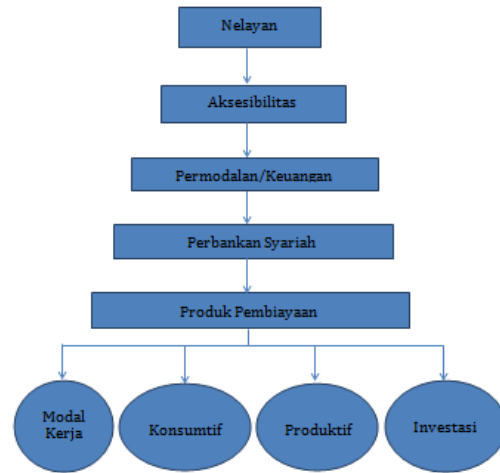
disertai persyaratan-persyaratan tertentu.

Kerangka Pemikiran

Nelayan memerlukan banyak biaya dan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, dengan terbatasnya peralatan yang digunakan untuk melaut dan tidak menentunya perubahan cuaca membuat pendapatan yang dihasilkan nelayan sehari-hari juga tidak menentu. Penghasilan yang didapatkan nelayan setiap hari biasanya habis untuk kebutuhan sehari-hari nelayan dan keluarganya. Oleh sebab itu nelayan selalu kekurangan modal untuk melengkapi peralatan melaut dan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Nelayan membutuhkan modal besar yang bisa membantu mencukupi modal yang dibutuhkan nelayan untuk melakukan kegiatan usahanya, sebenarnya perbankan memiliki peranan penting untuk dapat membantu permasalahan permodalan yang dihadapi nelayan, misalnya dengan memberikan pembiayaan. Namun, dalam pemberian pembiayaan di perbankan syariah diperlukan prosedur dan proses yang tidak mudah. Contohnya, penyerahan jaminan sebagai satu dari beberapa syarat dalam pemberian pembiayaan yang sulit dipenuhi dan pendapatan nelayan yang tidak pasti. Kondisi ini akan menjadi sangat sulit untuk nelayan, karena kondisi perekonomian nelayan yang merucut pada kemiskinan.

Dengan pemasalahan yang dihadapi nelayan dapat dilihat apakah bank memiliki solusi untuk membantu nelayan dan memberikan pembiayaan modal usaha pada nelayan dengan terbatasnya jaminan yang dapat diberikan nelayan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
 Sumber: Penulis, Data diolah (2017)

Aksesibilitas nelayan terhadap pembiayaan di perbankan syariah masih sulit, namun dengan adanya inovasi produk pada produk pembiayaan di perbankan syariah bisa memungkinkan nelayan untuk mendapatkan bantuan pemberian pembiayaan modal usaha dari perbankan syariah.

Nelayan membutuhkan akses ke perbankan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah guna membantu nelayan mengurangi beban biaya dan modal untuk kebutuhan melaut dan melakukan kegiatan usahanya. Kebutuhan nelayan tidak hanya terpaku pada kebutuhan modal kerja saja, tapi juga nelayan membutuhkan biaya untuk memenuhi banyak hal dalam kehidupan sehari-harinya.

Nelayan membutuhkan pembiayaan dari perbankan syariah seperti modal kerja yang dapat digunakan nelayan untuk memenuhi perlengkapan tangkap ikan yang akan dimanfaatkan oleh nelayan saat melakukan kegiatan usahanya. Pembiayaan konsumtif dibutuhkan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Nelayan juga membutuhkan pembiayaan produktif dan pembiayaan investasi yang digunakan nelayan untuk memperbaiki tempat tinggal nelayan dan keluarganya agar lebih layak untuk ditinggali, selain itu

pembiayaan ini juga digunakan nelayan untuk melengkapi peralatan melaut seperti membeli kapal, yang bisa digunakan jangka panjang untuk berlayar dan diharapkan dapat meningkatkan hidup masyarakat nelayan menjadi lebih sejahtera.

Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi bertujuan untuk memberikan penjelasan dari fenomena yang terjadi pada kebanyakan nelayan saat ini mengenai aksesibilitas mereka terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Nelayan pesisir pantai Pelabuhan Ratu merupakan objek dari penelitian ini.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara terstruktur kepada responden, observasi dan studi dokumentasi dari bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu. Sedangkan untuk data sekundernya diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2015 : 225).

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis pendapatan nelayan, pengeluaran, kebutuhan akan modal, kesesuaian produk pembiayaan dan design lanjutan mengenai produk pembiayaan yang sesuai untuk kebutuhan nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Nelayan terhadap Pembiayaan di Bank Syariah

Akses merupakan suatu derajat kemudahan untuk mencapai suatu keinginan atau kebutuhan. Sedangkan akses pembiayaan sendiri merupakan jalan atau cara bagaimana seseorang bisa mendapatkan atau memperoleh pembiayaan. Banyak langkah-langkah yang wajib dilewati seorang nelayan untuk bisa memperoleh pembiayaan di bank syariah yaitu dengan mengikuti prosedur

dan persyaratan dari bank (Nusantari, 2011:02).

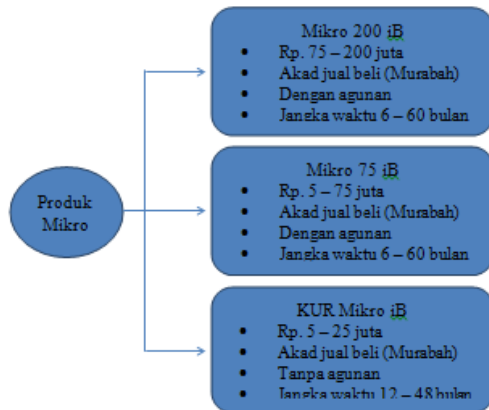
Salah satu permasalahan yang biasa dihadapi oleh para nelayan ataupun biasa terjadi dalam dunia kelautan lain yang berhubungan dengan perikanan yang bergerak dibidang usaha mikro yaitu adalah kesulitan untuk mendapatkan penambahan modal dari lembaga-lembaga formal seperti lembaga perbankan. Kurangnya permodalan dalam kehidupan dan kegiatan usaha inilah yang memaksa nelayan untuk mengambil alternatif yaitu melalui pinjaman yang ditawarkan oleh para rentenir dengan penawaran syarat dan ketentuan yang begitu mudah dan pencairan uang yang cepat namun dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi. Kurangnya permodalan yang dibutuhkan nelayan ini pun diperburuk dengan rendahnya harga penjualan hasil tangkapan ikan yang didapatkan nelayan ke tengkulak. (Nugroho, 2015:20, Tampubolon, 2009:8).

Nelayan tidak bisa memaksa lembaga perbankan untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan nelayan guna membantu permodalan nelayan dikarenakan nelayan tidak mampu memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya yang mengajukan pembiayaan (Pratomo, D., 2009:4-5).

Berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan nelayan inilah yang membuat nelayan terus menerus terjat dalam kemiskinan. Namun, Bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu memiliki solusi baik untuk dapat membantu nelayan yang ada di Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan modal melalui pengajuan pembiayaan dengan persyaratan ringan dan juga dengan angsuran yang sanggup dipenuhi nelayan setiap bulannya.

Bank BRI Syariah menyediakan produk pembiayaan mikro dengan 3 produk yang berbeda yang bisa digunakan nelayan untuk memenuhi kekurangan modal dalam kegiatan usahanya. Pembiayaan yang ditawarkan kepada

nelayan berupa investasi dan pembiayaan modal kerja. Adapun 3 produk tersebut adalah:



Gambar 2. Produk Mikro BRI Syariah
 Sumber: (Modul Unit Head BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu, 2017)

Pemberian pembiayaan yang diberikan bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu kepada nelayan nasabah biasanya diberikan pembiayaan modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha nelayan, sedangkan pemberian pembiayaan konsumtif diberikan untuk nasabah umum atau yang memiliki usaha sendiri (Contoh : pemilik pabrik tahu).

a. Aksesibilitas Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pemberian pembiayaan yang dimanfaatkan untuk membantu memenuhi modal kerja perusahaan atau industri perorangan sesuai kebutuhan, baik berupa modal kerja regular atau modal kerja musiman. Keuntungan yang bisa diperoleh dari adanya pembiayaan modal kerja ini adalah adanya struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan jadwal serta pembayaran angsuran pembiayaan yang berdasarkan cashflow yang disepakati bersama antara nasabah dan bank (Ilyas, 2015:194).

Akses pembiayaan modal kerja di bank BRI Syariah bisa didapatkan dengan mudah oleh nelayan pemilik, karena nelayan juragan dapat memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan yang diberikan bank pada

nasabahnya. Selain itu, penghasilan yang diperoleh nelayan pemilik stabil pada setiap bulannya yang berkisar antara 3.000.000 sampai dengan 5.000.000 rupiah. Nelayan pemilik biasanya mengajukan pembiayaan mikro jenis iB 75 dengan plafon 5-75 juta dan jangka waktu pembayaran 6-60 bulan yang digunakan untuk mencukupi kurangnya modal kerja seperti pembenahan kapal yang digunakan untuk melaut, pembekalan konsumsi, BBM (Bahan Bakar Minyak), umpan dan jenis umpan, es balok, dan lain sebagainya.

Nelayan pemilik yang mengajukan permohonan pembiayaan mikro 75 iB ini biasanya menjaminkan sertifikat-sertifikat atau akta-akta yang dimiliki nelayan. Nelayan pemilik merupakan nelayan yang sudah hidup dengan kesejahteraan dan memiliki aset-aset pribadi sendiri yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk diagunkan ke bank syariah.

Bagi nelayan kecil Bank BRI Syariah memberikan kemudahan mendapatkan akses pembiayaan yaitu dengan adanya produk pembiayaan mikro jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat). Namun, tidak semua nelayan kecil bisa memperoleh pembiayaan KUR ini karena tetap harus mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan bank. Pembiayaan KUR tidak mengharuskan nelayan memiliki agunan untuk dijaminkan tetapi dengan syarat nelayan tersebut harus mempunyai usaha produktif yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun atau anggota keluarga yang berprofesi karyawan/karyawati dengan penghasilan tetap. Produk pembiayaan KUR berplafon 5-25 juta dengan kurun waktu pembayaran maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja. Nelayan kecil bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dari nelayan pemilik, dengan penghasilan 1,5-2,5 juta rupiah setiap bulannya.

Menurut hasil wawancara pembiayaan KUR ini diberikan kepada nelayan kecil karena angsuran yang ringan setiap bulannya dengan angsuran kurang dari 500 ribu rupiah setiap bulannya yang bisa dipenuhi oleh nelayan kecil dengan penghasilan nelayan kecil yang terbatas dan tidak menentu setiap bulannya.

Tetapi justru nelayan kecil di pelabuhan ratu tidak bisa mendapatkan pembiayaan modal kerja yang memang sangat dibutuhkan, karena nelayan kecil di pelabuhan ratu tidak memiliki usaha produktif seperti yang disyaratkan dalam produk KUR Mikro iB. nelayan kecil di pelabuhan ratu memiliki pekerjaan sampingan hanya sebagai pedagang asongan ketika tidak sedang melaut untuk tetap bisa memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada responden di bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu, tidak terdapat persyaratan khusus yang memudahkan akses nelayan kecil untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan nelayan untuk membantu pemenuhan kebutuhan modal kerja nelayan. Bank tersebut tidak membedakan persyaratan yang diberikan kepada nasabahnya baik nasabah tersebut dari kalangan nelayan atau bukan. Jadi, tidak ada syarat khusus atau tindakan khusus dari bank syariah untuk memudahkan nelayan kecil agar bisa memanfaatkan produk pembiayaan mikro di bank syariah.

b. Aksesibilitas pembiayaan dalam bentuk investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan pengadaan berupa barang konsumtif yang ditujukan untuk kebutuhan investasi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan investasi

seorang nasabah dengan keuntungan pembelian investasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan cashflow (Ilyas, 2015:194).

Pembiayaan investasi ini nyaris sama dengan pembiayaan modal kerja, hanya saja penggunaan dana yang berbeda, pembiayaan investasi biasa digunakan nelayan pemilik di pelabuhan ratu untuk pembelian tempat penampungan hasil tangkapan ikan atau sering disebut bong. Selain pembelian bong penggunaan dana investasi ini biasa digunakan untuk pembelian mesin kapal, alat tangkap jangka panjang, ataupun kapal. Pembiayaan dalam bentuk investasi diberikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, dengan produk iB 75 untuk nelayan pemilik dan KUR Mikro iB untuk nelayan kecil sama seperti pada pembiayaan modal kerja.

Namun, dari hasil wawancara nelayan lebih sering melakukan pembiayaan berupa modal kerja dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk investasi, karena modal kerja lebih sering dibutuhkan dan lebih banyak memerlukan dana besar dibandingkan pembelian peralatan lain yang termasuk dalam kategori investasi. Begitu pula pada nelayan kecil, bahkan hampir tidak ada nelayan kecil yang mengajukan pembiayaan dalam bentuk investasi karena alasan yang sama, pembiayaan modal kerja lebih dibutuhkan.

Mekanisme Pemberian Pembiayaan di BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu

Mekanisme pembiayaan merupakan proses dan tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sampai pengajuan pembiayaan dan prosesnya terealisasi.

Mekanisme yang dilakukan bank bri syariah kcp pelabuhan ratu dalam memberikan pembiayaan kepada nelayan pelabuhan ratu yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja

Nasabah yang mengajukan pembiayaan berupa modal kerja baik produk Mikro iB 75 ataupun KUR harus melengkapi data dan dokumen identitas nasabah, izin usaha dan dokumen perusahaan, formulir kelengkapan pembiayaan, agunan yang akan dijaminkan dan persyaratan umum lainnya.

2. Mekanisme pemberian investasi

Mekanisme pemberian pembiayaan investasi tidak berbeda jauh dengan mekanisme pemberian pembiayaan modal kerja, diperlukan syarat dan dokumen-dokumen untuk proses pembiayaan.

Adapun mekanisme pemberian pembiayaan investasi yang pertama adalah melengkapi data nasabah dan dokumen nasabah, izin usaha dan dokumen perusahaan, formulir kelengkapan pembiayaan dan persyaratan umum lainnya.

Mekanisme pemberian pembiayaan di bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu sama dengan pemberian pembiayaan di bank syariah pada umumnya, tidak hanya sebatas kelengkapan dokumen dan data nasabah, mekanisme pemberian pembiayaan ini dilanjutkan dengan analisis pembiayaan. Dasar pemberian pembiayaan mikro bank tersebut adalah karena kebutuhan, kemampuan, jaminan.

Kebutuhan ini yaitu menentukan besarnya nominal pembiayaan yang dibutuhkan nasabah nelayan, kemampuan yaitu menentukan kesanggupan nasabah nelayan dalam membayar angsuran setiap bulannya, dan agunan yang menentukan bahwa nasabah nelayan memiliki asset yang cukup untuk dijual apabila terjadi wanprestasi.

Adanya dasar pembiayaan mikro ini pun didasari oleh analisis 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Berikut penjelasan analisis 5C :

- 1) *Character*, ialah suatu sifat atau karakter dari nasabah baik dalam kehidupan perseorangan maupun dalam lingkungan kegiatan usaha nasabah. Tujuan adanya analisis karakter nasabah ini yaitu untuk memahami sejauh mana dan sebesar apa tanggung jawab nasabah untuk mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya antara nasabah dengan pihak bank. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sifat dan karakter nasabah tersebut, bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Meneliti data dan riwayat hidup nasabah
 - b) Meneliti reputasi nasabah di kawasan usahanya dan lingkungan tempat tinggalnya
 - c) Mencari berita dari bank lain terkait pembiayaan nasabah di bank lain jika ada
 - d) Mencari informasi apakah nasabah memiliki sifat yang kurang baik seperti suka berjudi dan berfoya-foya atau hal buruk lainnya.
- 2) *Capacity*, ialah kemampuan nasabah untuk mengelola usahanya dan membayar pinjaman yang diambil. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mencari tahu seberapa jauh calon nasabah dapat melunasi angsuran pembiayaan dengan tepat waktu, dari penghasilan usaha yang dikelolanya. Pengukuran *capacity* ini dapat dijalankan dengan berbagai cara, yaitu :
 - a) Pendekatan historis, apakah usaha nasabah itu mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, seperti nelayan apakah

- hasil tangkap yang dihasilkan oleh nelayan melimpah dan stabil dari waktu ke waktu.
- b) Pendekatan finansial, hal ini begitu penting dilakukan bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi tinggi semacam rumah sakit
 - c) Pendekatan yuridis, hal ini dilaksanakan untuk menilai bahwa tidak adanya kejadian dimana calon nasabah mengutus badan usaha lain untuk melakukan akad atau kontrak pembiayaan dengan bank
 - d) Pendekatan manajerial, hal ini dilaksanakan untuk menilai seberapa jauh nasabah mampu mengelola faktor-faktor produksi yang sudah dibiayai oleh bank, seperti tenaga kerja (ABK/Anak Buah Kapal), peralatan/mesin-mesin kapal, administrasi dan keuangan, serta sampai mana kemampuan nasabah nelayan mampu menguasai pasar ikan dalam artian mampu menjual semua hasil tangkapan dengan harga bagus.
- 3) *Collateral*, ialah analisis jaminan milik calon nasabah yang diserahkan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap jaminan ini melingkupi jenis lokasi agunan, status hukum dan bukti kepemilikan dari agunan tersebut.
 - 4) *Capital*, ialah besaran dana yang dimiliki nasabah. Saat modal nasabah semakin besar maka kesungguhan dan kemampuan nasabah mengelola usahanya akan semakin tinggi serta menjadikan bank semakin percaya untuk memberikan pembiayaan.
 - 5) *Condition*, ialah analisis yang menilai suatu kelancaran dari usaha yang dijalani nasabah. Analisis ini dilakukan dengan

beberapa penelitian yaitu keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, Perekonomian dunia dan situasi politik, situasi lain yang mempengaruhi pasar. Adapula situasi ekonomi yang penting untuk di perhatikan, yaitu mencakup:

- a) Pemasaran kebutuhan
- b) Daya beli masyarakat terhadap ikan dan hasil laut lainnya
- c) Luas jangkauan pasar
- d) Bentuk persaingan
- e) Perkembangan teknologi, dan lain sebagainya.

Mekanisme pemberian pembiayaan pun tidak semata-mata hanya terletak pada analisis 5c seperti yang sudah dijelaskan diatas, tetapi masih banyak tahapan-tahapn lain yang menjadi pertimbangan pihak bank untuk dapat memberikan pembiayaan kepada nelayan.

Tahapan pemberian pembiayaan ini dilakukan harus dengan ketelitian yang sangat benar dan jeli karena tidak sedikit nasabah yang memalsukan dokumen dan data dirinya untuk bisa menerima pembiayaan dari bank syariah.

Pada tahapan awal bank syariah melakukan penelitian terhadap berkas dan pencatatan data nasabah apakah data tersebut adalah data yang sebenarnya milik nasabah atau bukan, selanjutnya dilakukan penelitian terhadap realisasi usaha yang selanjutnya akan dibiayai oleh pihak bank jika pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan modal kerja dan penelitian terhadap barang yang akan dibayar jika nasabah mengajukan pembiayaan bentuk investasi. Tahapan akhir dari analisis pemberian pembiayaan adalah pengkajian dan penilaian barang yang dijaminan oleh nelayan itu sendiri. Pemeriksaan pada jaminan yang diagunkan nelayan ini penting dilakukan karna sudah pernah ada kasus yang terjadi sebelumnya dimana nasabah memberikan sertifikat palsu untuk dijaminan kepada bank. Oleh sebab itu, bank melakukan

penelitian dan pemeriksaan secara teliti terhadap jaminan yang diberikan nelayan terkait keaslian dari jaminan tersebut seperti jaminan berupa sertifikat ataupun AJB (Akta Jual Beli).

Setelah seluruh dokumen dan jaminan diperiksa kelengkapan dan keasliannya, selanjutnya pihak bank yang bertugas menganalisa dokumen dan jaminan tersebut bisa menetapkan apakah pengajuan pembiayaan nasabah nelayan itu dapat itu layak direalisasikan atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan tersebut memadai untuk direalisasikan, maka pihak bank akan menyiapkan surat keputusan pembiayaan berupa kontrak/akad pembiayaan yang biasanya disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pada umumnya akad pembiayaan berisi nama dan alamat nasabah terkait pengajuan pembiayaan, kategori pembiayaan yang diajukan nelayan, tujuan penggunaan pembiayaan apakah untuk modal kerja atau investasi, jangka waktu pembiayaan yang diajukan nelayan, cara penarikan dana yang diberikan bank kepada nelayan atau biasa disebut pencairan pembiayaan, cara pengambilan dana pembiayaan, perhitungan margin, masa tenggang pelunasan pembiayaan, agunan yang diberikan serta nilai jaminan yang diagunkan, pengikat jaminan dan syarat-syarat lainnya.

Bersamaan dengan dokumen akad pembiayaan tersebut disertakan pula dokumen-dokumen lainnya, seperti foto-foto jaminan, bukti pembelian barang (untuk pembiayaan dalam bentuk investasi), hasil BI Cheking, Bukti riwayat pembiayaan di bank lain selama 3 bulan terakhir, dokumen pengikat akad dan jaminan, dokumen jaminan seperti sertifikat (SHM, SHGB, SHMSRS), IMB, AJB/APHB, Riwayat tanah/surat keterangan riwayat tanah, keterangan bebas sengketa, surat keterangan fisik jaminan.

Mekanisme pemberian pembiayaan di bank syariah diakhiri dengan

penandatanganan kontrak akad pembiayaan dari kedua pihak yaitu nasabah nelayan dan pihak bank. Pemutusan pembiayaan juga harus lengkap dengan adanya tempat dan tanggal penandatanganan kontrak akad pembiayaan (Ilyas, 2015:197-198 ; Umam, 2013:234-239).

Dari beberapa persyaratan yang diajukan bank kepada nelayan terdapat beberapa persyaratan yang tidak di mengerti oleh nelayan, yang membuat nelayan tidak mau melakukan pembiayaan di bank syariah. kebanyakan dari nelayan tidak memiliki DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) karena tugas nelayan kecil hanya melaut dan mencari ikan, sedangkan untuk DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) dimiliki oleh nelayan juragan.

Selain DRP bank juga mensyaratkan Laporan Keuangan, Laporan Penilaian Baran Jaminan, dan hasil BI Cheking. Persyaratan ini juga mempersulit nelayan karena nelayan tidak mengerti bagaimana membuat laporan keuangan, bahkan nelayan tidak tau bagaimana bentuk laporan keuangan yang dimaksud oleh bank. Pada BI Cheking nelayan mengalami kesulitan yang sama dengan laporan keuangan. Format BI Cheking yang rumit akan membuat nelayan semakin tidak berminat untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah. selain itu, dalam hasil BI Cheking menunjukkan riwayat pembiayaan nasabah, apakah nasabah tersebut pernah mengalami kredit macet atau tidak. Nelayan justru tidak ingin riwayat pembiayaannya diketahui orang lain karena menurut nelayan memiliki hutang adalah sebuah hal yang membuat nelayan malu jika diketahui orang lain. Terlebih lagi bank juga mensyaratkan untuk menyerahkan bukti riwayat pembiayaan di bank lain selama 3 bulan (jika ada). Jika pada hasil BI Cheking ditemukan riwayat pembiayaan nelayan tersebut, berarti nelayan tersebut harus menyerahkan bukti riwayat pembiayaan ke bank. Hal ini membuat nelayan tidak

berminat untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah.

Peran Serta BRI Syariah dalam Memberikan Akses Pembiayaan kepada Nelayan

Bank ialah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyedia dan penyalur dana sebagai perantara keuangan. Bank menerima dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikan kembali ke masyarakat berupa pembiayaan. Penyaluran pembiayaan ini memungkinkan dilakukan untuk membantu kekurangan modal kerja dan investasi.

Bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu menyediakan produk pembiayaan mikro yang bisa digunakan oleh nelayan pelabuhan ratu yang dimaksudkan untuk menolong para nelayan mencukupi kekurangan modal usaha dan pembelian kebutuhan investasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis kepada responden, Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu sudah banyak memiliki nasabah dari kalangan nelayan baik nasabah yang menyalurkan dana ke bank atau nasabah tabungan adapula nelayan yang melakukan pembiayaan di bank tersebut.

Nelayan yang mengajukan pembiayaan rata-rata merupakan nelayan pemilik di pantai pelabuhan ratu, produk pembiayaan yang dipilih adalah produk pembiayaan mikro iB 75 dengan plafon 5 sampai 75 juta rupiah yang umum digunakan untuk menambah kekurangan dana saat nelayan ingin melakukan kegiatan usahanya, untuk menambah kekurangan dana dalam mencukupi kebutuhan modal kerjanya nelayan mengajukan pembiayaan ke bank syariah dalam kategori modal kerja. Namun tidak jarang juga nelayan yang mengajukan pembiayaan dalam kategori investasi yang biasa digunakan nelayan pemilik kapal untuk membeli mesin kapal, ataupun bong yaitu alat yang dimanfaatkan untuk menampung dan menyimpan hasil tangkapan laut yang didapat.

Pada dasarnya pemberian pembiayaan untuk nelayan terdapat dalam produk iB KUR Mikro dengan plafon rendah hanya 5-25 juta dengan kurun waktu pembiayaan 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi, yang termasuk dalam produk pembiayaan mikro di bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu yang dimaksud yaitu dapat menyalurkan dan melakukan ekspansi penyaluran KUR kepada usaha produktif, menambah kapasitas daya saing menengah, kecil dan mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

Tetapi sejauh ini permohonan pembiayaan yang diajukan nelayan adalah produk pembiayaan mikro iB 75 karena plafon pembiayaan yang bisa di bilang rata-rata dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan nelayan pada umumnya. Nelayan tidak mengajukan pembiayaan mikro iB 200 karena plafon pembiayaan yang terlalu besar dan juga jangka waktu pelunasan pembiayaan yang kurang lama, Sedangkan untuk produk iB mikro plafon pembiayaannya terlalu kecil dan tidak cukup bila digunakan untuk menambah modal kerja ataupun pembelian barang investasi.

Menurut informasi dari responden pada penelitian yang dilakukan penulis, sebelumnya sudah pernah ada nelayan kecil yang mengajukan permohonan pembiayaan produk KUR mikro iB. namun, permohonan pembiayaan yang diajukan nelayan kecil itu tidak dapat direalisasikan karena salah satu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh nelayan yaitu diharuskan adanya usaha produktif yang sudah berjalan minimal 2 tahun, dan juga pendapatan nelayan kecil tidak menentu setiap bulannya berbeda dengan nelayan pemilik.

Ada beberapa nelayan kecil yang mengajukan pembiayaan mikro dengan menjaminkan kapalnya agar bisa mendapatkan pembiayaan dari bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu, namun tetap

saja pihak bank tidak dapat merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut dengan alasan jika nelayan menjaminkan kapalnya ke bank kemudian sewaktu-waktu terjadi kredit macet secara berangsur-angsur atau bermasalah dalam hal pelunasan pembiayaannya, bank akan sulit untuk melakukan pelelangan terhadap kapal yang dijaminkan. Selain itu, kemungkinan hasil pelelangan kapal yang dijaminkan nelayan belum bisa dipastikan dapat menutup hutang nelayan pada bank.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peran serta bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu belum mendukung kebutuhan nelayan terhadap pembiayaan yang disediakan bank syariah. Akses pembiayaan yang ditempuh nelayan untuk memperoleh pembiayaan dari bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu sama dengan nasabah pada umumnya dan tidak membedakan antara nelayan atau bukan nelayan, tidak ada persyaratan khusus yang disyaratkan kepada nelayan agar nelayan bisa lebih mudah menerima pembiayaan dari bank syariah.

Bank BRI syariah KCP Pelabuhan Ratu juga tidak membedakan sanksi yang diberikan jika terjadi kredit macet secara berkelanjutan. Sama halnya dengan nasabah lainnya yang bukan dari kalangan nelayan, jika nelayan terlambat membayar angsuran selama 1 bulan maka bank akan mengeluarkan SP 1, jika nelayan terlambat membayar angsuran selama 2 bulan akan dikeluarkan SP 2, jika nelayan terlambat membayar angsuran selama 3 bulan bank akan mengeluarkan SP 3.

Namun jika pembayaran angsuran macet sampai diatas 2 tahun, maka agunan yang berbentuk sertifikat akan dilelang, dan hasil pelelangan dari sertifikat tersebut akan ditentukan oleh pusat, biasanya digunakan untuk menutup hutang nelayan kepada bank dan jika masih ada sisa dana hasil pelelangan akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Berbeda dengan agunan berbentuk Akta. Agunan berbentuk akta

akan dijual bersama sesuai kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Dijual bersama dalam artian bank dan nasabah bersama-sama menawarkan agunan tersebut untuk dijualbelikan.

Banyak pula nelayan kecil yang berpendapat berbeda dari pendapat pihak bank syariah. Banyak nelayan yang tidak berminat dan tidak mau memanfaatkan adanya produk pembiayaan mikro di bank syariah dan justru lebih memilih berhutang kepada tengkulak, nelayan pemilik kapal atau bahkan rentenir. Padahal sudah sangat jelas bahwa meminjam dana dari perorangan akan menjadikan nelayan terjerat dengan bunga hutang yang lebih besar dan membuat hutang nelayan semakin lama semakin besar dari pinjaman awal.

Nelayan tidak mau menggunakan pembiayaan di bank syariah dengan alasan bahwa prosedur dan persyaratannya yang rumit, jaminan yang tidak bisa dipenuhi serta lamanya analisis dan pencairan dana pembiayaan yang tidak dapat langsung dicairkan dan diterima nelayan dan memakan waktu sampai 4 hari. Selain itu persyaratan dari bank yang mengharuskan nelayan memiliki usaha produktif untuk bisa mengajukan permohonan pembiayaan membuat nelayan tidak mau menggunakan produk pembiayaan mikro bank syariah.

Nelayan pelabuhan ratu membutuhkan banyak sekali modal kerja untuk bisa melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, karena setiap kali melaut nelayan akan bisa menghabiskan waktu sampai berhari-hari berada di tengah laut untuk memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Maka dari itu nelayan membutuhkan suntikan dana untuk modal kerja. Seharusnya keberadaan bank syariah bisa menjadi solusi untuk nelayan memecahkan permasalahan modal kerja yang diperlukan nelayan dengan memberikan akses kemudahan kepada nelayan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank syariah. Tetapi, hingga saat ini bank syariah nelayan atau bukan

nelayan mendapat pelayanan sama. Tidak ada ketentuan khusus untuk membantu nelayan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nelayan kecil masih hidup di tengah kondisi ekonomi yang rendah dimana nelayan masih berpaut pada hutang rentenir, tengkulak dan lainnya yang memakai sistem bunga yang tinggi.
2. Akses nelayan untuk memperoleh pembiayaan di bank syariah masih sangat sulit, karena nelayan yang bisa memperoleh akses pembiayaan hanya nelayan besar atau nelayan juragan. Adanya bank syariah belum mampu memecahkan permasalahan nelayan kecil yaitu akses memperoleh pembiayaan di bank syariah.
3. Modal kerja tambahan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan nelayan kecil untuk bisa terus melanjutkan kegiatan usahanya, karena nelayan tidak hanya membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan hidup harian, tetapi nelayan juga membutuhkan modal yang tidak sedikit setiap kali melaut. Seperti untuk bekal makanan, bahan bakar minyak untuk mesin kapal, es balok dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan memilih untuk tidak menggunakan produk pembiayaan di bank syariah karena kendala persyaratan dan jaminan yang tidak bisa dipenuhi nelayan.
4. Dari sekian banyak produk-produk pembiayaan di bank syariah sebenarnya ada satu dari beberapa produk yang dapat digunakan nelayan untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam masalah kekurangan dana. Produk pembiayaan tersebut adalah produk KUR Mikro iB dimana dalam ketentuannya sektor ekonomi yang dapat dibiayai oleh bank satu

diantaranya adalah sektor perikanan. Produk ini mampu menjadi satu alternatif bagi nelayan dari beberapa produk mikro yang ada yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nelayan, seharusnya produk ini bisa dimanfaatkan nelayan kecil untuk menghasilkan tambahan modal.

5. Dampak apabila produk KUR Mikro iB benar-benar diperuntukan bagi nelayan, maka tidak hanya pekerjaan melautnya saja yang terbantu, tetapi juga berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, Mhd. 2011. Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 35, Hal. 114.
- BRI Syariah. 2017. Modul Unit Head BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu.
- Fathoni, N. A. 2015. Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan (Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap).
- Ilyas, R. 2015. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*. Vol. 9, Hal. 194-198.
- Juwita, D. 2015. Peran Perempuan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Desa Mertasinga. *Jurnal AL-Amwal*. Vol. 7, Hal.146.
- Kurnia, T., Aziz, I. A., Apriana, M., Apriliansyah, R., & Wijaya, A., 2021. Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Nelayan Palabuhanratu : Improving the Financial Management Skills of Palabuhanratu Fishermen's Household. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 135-141.

- <https://doi.org/10.30997/almujtam.ae.v1i3.4965>
- Lubis, E., Pane, B. A., dan Hamzah, A. 2012. Besaran Kerugian dalam Pemasaran Hasil Tangkapan : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. *Maspari Journal*. Vol. 4, Hal.1.
- Nugroho, M. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan : Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumber daya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Pangan*. Vol.6, Hal. 20.
- Nusantari, FAA. 2011. Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir). Hal. 02.
- Pratomo, D., Hubeis, M., dan Sailah, I. 2009. Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Kasus LKMS BMT KUBE Sejahtera Unit 20, Sleman-Yogyakarta). *Jurnal MPI*. Vol. 4, Hal.4-5.
- Pujiyono, A. Dan Nugraha, S. H. 2015. Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin di Indonesia. Seminar Nasional Multi Disiplin dan Call For Pappers. Hal 2-3.
- Purna, I. 2005. Strategi dan Model Pembiayaan Mikro bagi Nelayan Kecil. Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702). Hal.3-8.
- Rahayu, L. 2015. Aksesibilitas Petani Bawang Merah Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Sumber Pembiayaan. *Jurnal Agraris*. Vol. 1. Hal. 54.
- Simahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Hal.1-3.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods).
- Sukron. 2011. Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang). Hal.3-5.
- Supanggih, D., dan Widodo, S. 2013. Aksesibilitas Petani Terhadap Lembaga Keuangan (Studi Kasus Pada Petani di Desa Sidodai Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Vol. 2, Hal. 181.
- Tampubolon, D. 2009. Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 17, Hal. 5-6.
- Umam, Khaerul, S.IP.,M.Ag. 2013. Manajemen Perbankan Syariah.
- Vibriyanti, D. 2014. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 9, Hal. 46-52.
- Wahyono, A. 2004. Pengembangan Pemilikan Modal Bersama Sarana Penangkapan (Capital Sharing) di Kalangan Nelayan Miskin. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 6, Hal.50-51.
- Wijayanti, L., dan Ihsannudin. 2013. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Vol. 2. Hal.14-150.